

KERTAS KEBIJAKAN (*POLICY PAPER*)
EVALUASI SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi pembangunan kawasan pendidikan di atas lahan seluas kurang lebih seratus hektar di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, pada 2011. Rencananya, di kawasan tersebut akan didirikan SD, SMP, SMA, SMK, dan Politeknik, didukung sarana penunjang seperti asrama siswa, gedung serba guna, *medical center*, masjid, *guest house*, termasuk area perkebunan percontohan dan sarana penunjang lainnya. Saat ini yang sudah dibangun adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu (SMKN UT) Anak Tuha, dengan sarana penunjang berupa asrama siswa, perumahan guru, serta sarana lainnya, dalam satu pengelolaan SMKN UT. Pada 2015, ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), untuk pengembangan *Techno Park*, di kawasan tersebut.

Pendirian SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha merupakan bagian kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung, BPPT, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pendirian SMK dengan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknik Energi Biomassa itu dilatarbelakangi ancaman krisis energi global, seiring menipisnya cadangan sumber energi fosil, sehingga kebutuhan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (*bioenergy*) semakin tinggi.

SMKN UT Anak Tuha mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2011/2012. Kapasitasnya, 50 siswa dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota asal siswa (beasiswa). Namun, peserta didik angkatan pertama hanya 47 orang, atau tidak memenuhi kuota. Proses pendidikannya menerapkan sistem *boardin school*. Peserta didik tinggal di asrama sekolah.

Manajemen SMKN UT menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya, hak kepemilikan atau status lahan yang belum tuntas. Sertifikat tanah masih menginduk dalam sertifikat lahan milik BPPT. Tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan semua masih berstatus honorer dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah. Hanya satu PNS yaitu kepala sekolah sendiri. Akses jalan dari dan ke SMKN UT Anak Tuha yang berstatus jalan kabupaten, juga rusak sepanjang tahun tanpa perbaikan yang berarti. Akibatnya, guru dan tenaga kependidikan yang tinggal jauh dari lokasi SMKN UT, setiap hari harus merasakan “penderitaan” saat melewati jalan yang kondisinya sangat tidak layak itu.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mendalami proses penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha terhadap tujuan awal pendirian sekolah tersebut?
2. Apakah proses penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha telah berjalan sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan? Kendala apa yang dihadapi?
3. Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung terkait keberlanjutan satuan pendidikan tersebut?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (kualitatif deskriptif). Desain penelitian dilakukan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan kondisi nyata satuan pendidikan dan proses pendidikan eksisting di sekolah, kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen sekolah dan proses pembelajaran, serta hasil yang telah dicapai.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung (data primer) melalui observasi, interview, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sekolah. Pemangku kepentingan internal sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Komite Sekolah. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal terdiri dari alumni SMKN UT, Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, dan B2TP-BPPT. Diskusi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pendidikan terkait kondisi SMKN UT.

B. PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

2.1. Pengelolaan Satuan Pendidikan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut dinilai setiap tahun oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, yang di tingkat provinsi dilaksanakan Badan Akreditasi Provinsi.

Dalam rangka mengetahui tingkat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tersebut, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan luaran (*output*). Monitoring mementingkan proses yang dilakukan dan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan. Satuan pendidikan disebut telah memenuhi SNP, jika kedelapan standar tersebut sudah tercapai dengan skor lebih dari 91 hingga 100 atau dengan peringkat “A” yang berarti berpredikat “unggul.”

Sedangkan evaluasi adalah proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dalam bidang pendidikan, menurut Ralph Tyler (1950), evaluasi merupakan proses pengumpulan data dan informasi untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan pada bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Proses evaluasi bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

2.2. Evaluasi Satuan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalamnya, berlangsung proses pembelajaran, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik (guru), didukung media dan sumber belajar yang cukup pada suatu lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi pendidikan meliputi pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi memberikan manfaat, antara lain, mengetahui kelemahan dan kekuatan perencanaan dalam suatu kegiatan pendidikan; menentukan derajat efektivitas kegiatan terhadap target dari sumber daya pelayanan, dan keuntungan yang diharapkan oleh para pihak terkait dalam lingkup satuan pendidikan tersebut; serta mengetahui dampak secara langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam satuan pendidikan tersebut. Evaluasi diharapkan menghasilkan informasi yang berguna bagi otoritas kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan.

2.3. Sekilas Sejarah SMKN UT

SMK UT Anak Tuha, Lampung Tengah ini, berdiri berdasar Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/675/III.01/HK/2011 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional Kabupaten Lampung Tengah, yang ditandatangani Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. pada 19 November 2011.

Baru pada 4 Februari 2014, terbit Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 63/KPTS/D.1/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Unggul Terpadu Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Dengan dua keputusan tersebut, status SMKN UT yang berada dalam binaan Pemerintah Provinsi Lampung, juga menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah tersebut.

SMKN UT mulai menerima peserta didik pada tahun pelajaran 2011/2012, dengan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknologi Bio Energi. Peserta didik (*input*) SMKN UT berasal dari utusan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang berprestasi. Karena pembangunan asrama siswa pada saat penerimaan angkatan pertama masih dalam proses pembangunan, sebanyak 47 peserta didik angkatan pertama terpaksa harus dipondokkan sementara di rumah penduduk tak jauh dari lokasi SMKN UT. Baru pada 2013, peserta didik bisa menempati asrama siswa SMKN UT yang telah selesai dibangun. Kerja sama SMKN UT dengan Balain Besar Teknologi Pati (B2TP-BPPT) yang telah dijalin berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPPT, telah terlaksana sejak 2012, antara lain, dengan mendatangkan tenaga pendidik dari B2TP selain penyediaan tempat praktek (magang) bagi peserta didik SMKN UT.

C. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Kebijakan

Hingga saat ini visi pendiriannya SMKN UT belum tercapai secara optimal. Predikat “unggul terpadu” belum mampu diterjemahkan dan ditampilkan dalam kinerjanya, antara lain, berupa luaran (lulusan) serta hasil (kompetensi) yang tinggi yang layak dibanggakan. Banyaknya anggaran yang telah digelontorkan untuk infrastruktur fisik di lokasi yang rencananya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu tersebut. Belum seimbang dengan hasil yang dicapai saat ini.

Dari hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di SMKN UT, semua pemangku kepentingan masih memiliki harapan yang tinggi terhadap sekolah tersebut. Dalam diskusi yang dilaksanakan pada 15 Mei 2018 di SMKN UT, yang melibatkan unsur Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Lampung Tengah, pihak B2TP-BPPT, alumni SMKN UT, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta kepala sekolah, semua masih memberikan harapan sekolah tersebut dapat tetap eksis dan meningkat prestasinya. Mereka semua menyayangkan, apabila Pemerintah Provinsi Lampung sampai “mundur” dalam pengelolaan SMKN UT tersebut. Bahkan, dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi—sesuai amanah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan lebih optimal dalam meningkatkan mutu atau revitalisasi SMKN UT tersebut.

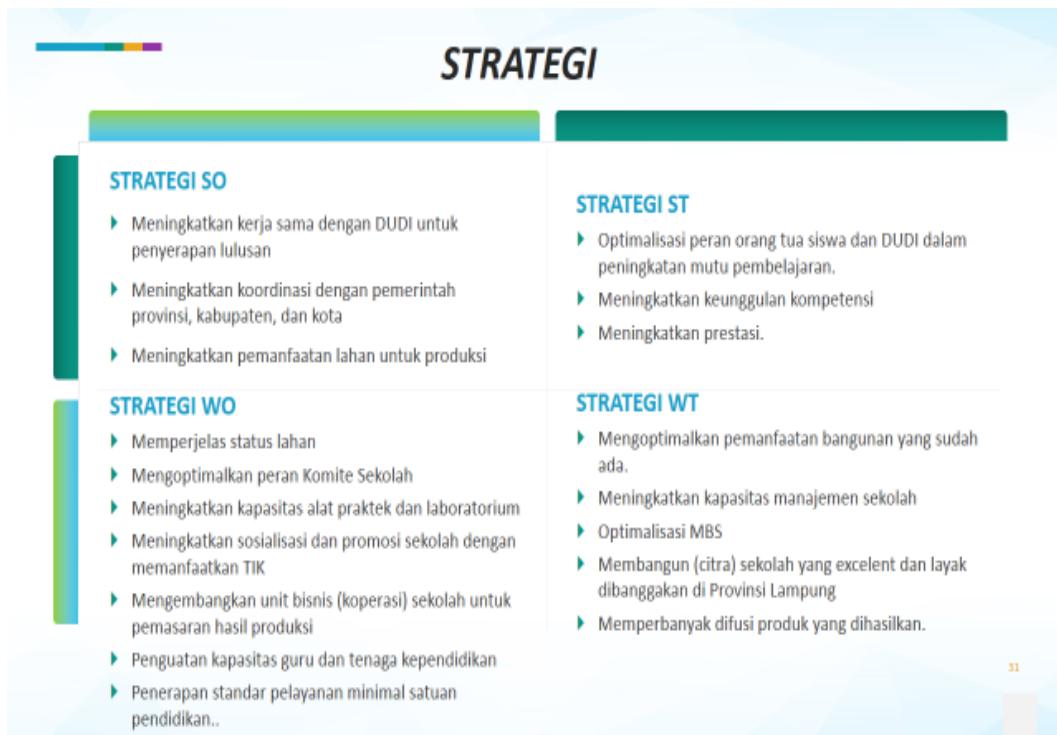
3.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang dipergunakan untuk memahami faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap suatu organisasi. Analisis ini sering dipergunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, dalam rangka meningkatkan kinerja atau produktifitas suatu organisasi atau perusahaan.

Analisis SWOT SMKN Unggulan Terpadu



STRATEGI



D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian ini, direkomendasikan alternatif kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu:

- Memperkuat kebijakan pengelolaan SMKN UT untuk menjadi sekolah yang benar-benar unggul terpadu, melalui: kebijakan sumber daya manusia terutama penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang mumpuni; seleksi dan pengangkatan kepala sekolah; penguatan manajemen sekolah dengan mengoptimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME); penataan manajemen keuangan; dukungan sarana-prasarana praktik dan laboratorium; serta mendorong pemecahan status lahan yang masih menyatu dengan BPPT.
- Memperkuat integrasi kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah dengan dinas terkait—seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum, dll—dimana SMKN UT diarahkan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam dalam aspek penyediaan tenaga trampil yang kompeten dengan fasilitas *workshop* serta laboratorium yang memadai. SMK UT bisa didorong menjadi pusat pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan yang ada di Provinsi Lampung.
- Memperkuat tata kelola SMKN UT dengan memberikan keleluasaan dan ruang yang cukup bagi pengelola satuan pendidikan, untuk menggunakan sumber daya yang ada (anggaran) dalam rangka mengembangkan kapasitas sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Revitalisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibutuhkan di SMKN UT, dalam rangka memperkuat kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, dengan kualitas manajemen yang mumpuni.
- Reorientasi SMKN UT, dengan melihatkan para pemangku kepentingan, khususnya para pihak yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung, BPPT, dan pemerintah kabupaten/kota bisa duduk bersama membahas kembali tentang keberlanjutan SMKN UT.